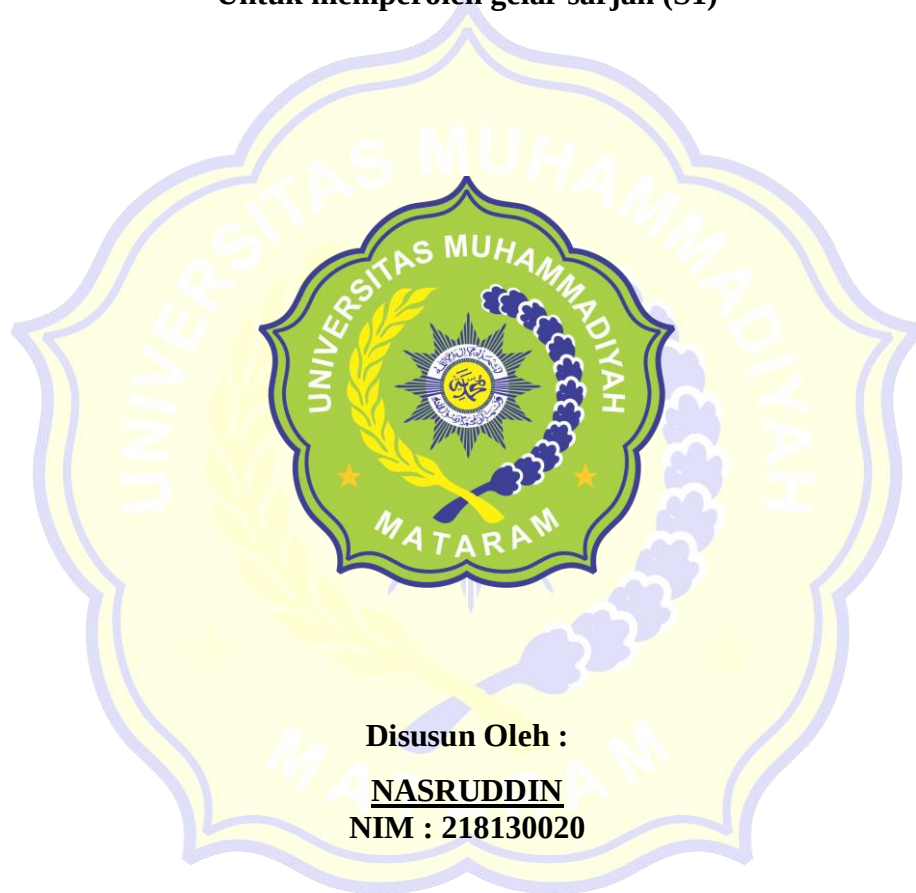


SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN DI DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjan (S1)**



**Disusun Oleh :
NASRUDDIN
NIM : 218130020**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN PEMBANGUNAN DI DESA PLAMPANG
KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2021

Disusun dan Diajukan Oleh :

NASRUDDIN
NIM.218130020

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipriksa dan Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Skripsi
Mataram, 3 Agustus 2022

Pembimbing I


Dedy Iswanto, ST.M.M.
NIDN. 0818087901

Pembimbing II


Rizal Umami, M.H.
NIDN. 0815118501

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN DI DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

Disusun dan Diajukan Oleh :

NASRUDDIN
NIM. 218130020

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 03 Agustus 2022 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji:

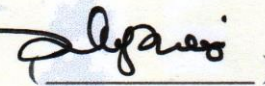
1. **Dedy Iswanto, ST.,M.M.**
NIDN.0818087901

PU

()

2. **Rizal Umami, M.H.**
NIDN.0815118501

PP

)

3. **Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP**
NIDN.0816057902

PN



Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasruddin

Nim : 218130020

Alamat : Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 3 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Nasruddin

NIM.218130020



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRUDDIN
NIM : 210130020
Tempat/Tgl Lahir : PLAMPANG 09 NOVEMBER 1999
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085 237 344 115
Email : NAZKRENNYY123@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN DI DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 02... SEPTEMBER... 2022

Penulis



NASRUDDIN
NIM. 210130020

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRUDDIN
NIM : 210130020
Tempat/Tgl Lahir : PLAMPANG 09 NOVEMBER 1999
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 237 344 115
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN ANEGARAN
DEMBANGUNAN DI DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 02 SEPTEMBER 2022

Penulis



NASRUDDIN
NIM. 210130020

Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, baik atau buruk.”

(Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, buka telinga, perluas dan lapangkan hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap proses dan momen dalam hidupmu, langkah mu masih panjang.”

(Nasruddin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dan telah diselsaikkannya skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih dan mepersembahkannya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Kaharuddin dan Ibu Buniati yang senantiasa memberikan dukungan berupa do'a, baik moril maupun materil.
2. Adik tersayangku Widia
3. Adik Perempuanaku Ratna ayu dan suaminya Deni Saputra.
4. Keponakanku tercinta Aden Al-Fajri dan Raisa
5. Kekasihku tercinta Maya sari.
6. Keluarga Besar Bapak kenun muhit dan keluarga besar Bapak malisi
7. Sahabatku tersayang Rian Saputra, Rizal shiyab, Wawan satria, Andi, Edi, Epen, Riski, Rian, Dedy Sopian, Sadam, dan Ros mini.
8. Teman-teman tercinta kelas A ilmu pemerintahan angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DI DESA PLAMPANG, KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah seperti yang kita rasakan sekarang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Strata Satu (S1). Di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dedy Iswanto, ST., M.M. selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Rizal Umami, M.H. selaku Dosen Pembimbing Dua yang selalu memberikan gambaran serta banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memotivasi serta memberikan dukungan kepada ananda sehingga ananda semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman dan rekan seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu belum sempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Mataram, 24 Juli 2022

Peneliti

Nasruddin

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DI DESA PLAMPANG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

Nasruddin¹ , Dedi Iswanto, ST., M.M.² , Rizal Umami, M.H.³
Mahasiswa¹ , pembimbing utama² , pembimbing³
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami pemerintah dalam perencanaan anggaran pembangunan di desa Plampang dalam memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran pembangunan di desa Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif, yang dimana hasil dari penelitian ini dijabarkan dengan metode deskriptif dengan menggunakan variabel pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan di desa Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 mengalami manipulasi data. Yang dimana data dan perencanaan kerja yang disusun dan di kerjakan oleh pemerintah daerah tidak secara terus terang dipublikasi kan atau di informasi kan kepada masyarakat. Hal ini diterangkan langsung oleh Ketua Karang Taruna dan beberapa tokoh masyarakat yang mengayatakan bahwa yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa hanya kadus dan perangkatnya.

Kata Kunci : Perencanaan Anggaran, Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, APBDES

**COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT BUDGET
PLANNING IN PLAMPANG VILLAGE, PLAMPANG DISTRICT,
SUMBAWA REGENCY IN 2021**

*Nasruddin¹, Dedi Iswanto, ST., M.M.², Rizal Umami, M.H.³
Student¹, First Consultant², Second Consultant³*

*Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram*

ABSTRACT

To provide information regarding community participation in planning the development budget in Plampang village, Sumbawa Regency, in 2021, the government faced several challenges, which led to the conduct of this research. This study's findings are documented utilizing a descriptive methodology and the variables of decision-making, program implementation, and usage of development results. It is a qualitative type of research. Both primary data and secondary data were used as data sources for this investigation. The researcher employs observational methods, interviews, and documentation to gather this information. According to the findings of this study, data tampering will affect community involvement in the 2021 development budget in Plampang Village, Sumbawa Regency. The local government does not make its data or work plans available to the general public or publish them. The Head of Karang Taruna and other community leaders openly addressed this, stating that only the head of the village and its machinery were involved in the creation of the village development planning.

Keywords: *Budget Planning, Village, Village Medium Term Development Plan, APBDES*



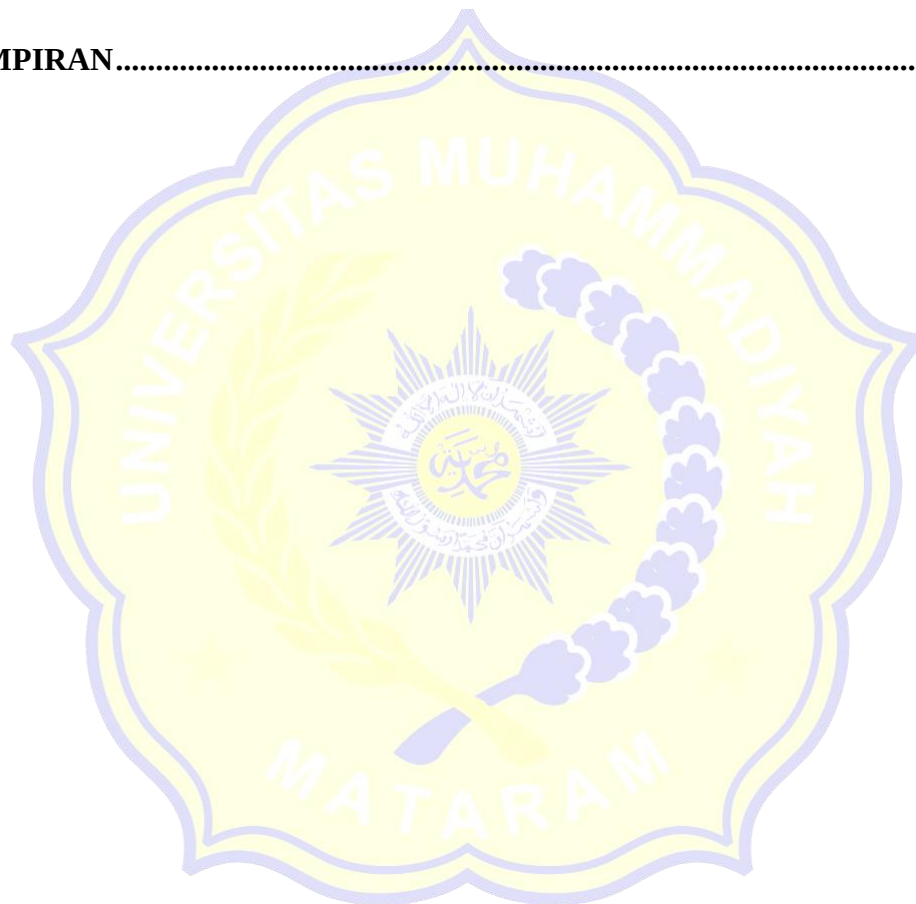
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Penelitian Terdahulu.....	16

2.2. Dasar Teori	20
2.2.1. Konsep Partisipasi	20
2.2.2. Bentuk Bentuk Partisipasi	22
2.2.3. Tingkatan Partisipasi	24
2.2.4. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	26
2.2.5. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi	29
2.2.6 Faktor Penghambat Partisipasi	31
2.3. Tinjauan Tentang Masyarakat	33
2.3.1. Bentuk Bentuk Masyarakat	35
2.4. Tinjauan Tentang Perencanaan Pembangunan Desa	38
2.4.1. Konsep Desa	38
2.4.2. Bentuk – Bentuk Desa	39
2.4.3. Definisi Perencanaan Pembangunan	42
2.4.4. Definisi Musrenbang	46
2.4.5. Keluaran Musrenbang.....	48
2.5. Kerangka Berfikir	49
2.6. Definisi Konseptual	51
2.7. Definisi Operasional	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1. Metode Penelitian	55
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
3.3. Teknik Penentuan Narasumber.....	57
3.4. Jenis Dan Sumber Data.....	58

3.5. Teknik Pengumpulan Data	59
3.6.1. Observasi	59
3.6.2. Wawancara	60
3.6.3. Dokumentasi.....	51
3.6. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Gambaran umum Desa Plampang	72
4.1.1 Sejarah Desa Plampang.....	72
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Plampang	73
4.1.3 Kependudukan	74
4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Plampang.....	79
4.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran di Desa Plampang	108
4.2.1 Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Plampang Dalam Penyusunan Pembangunan Desa....	108
4.2.2 Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Plampang.....	121
4.2.3 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) di Desa Plampang Tahun 2021	139
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Anggaran Pembangunan di Desa Plampang	154
4.3.1 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Anggaran Pembangunan di Desa Plampang.....	154

4.3.2 Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan	
Anggaran Pembangunan di Desa Plampang	161
BAB V PENUTUP	163
5.1 Kesimpulan	163
5.2 Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN	171

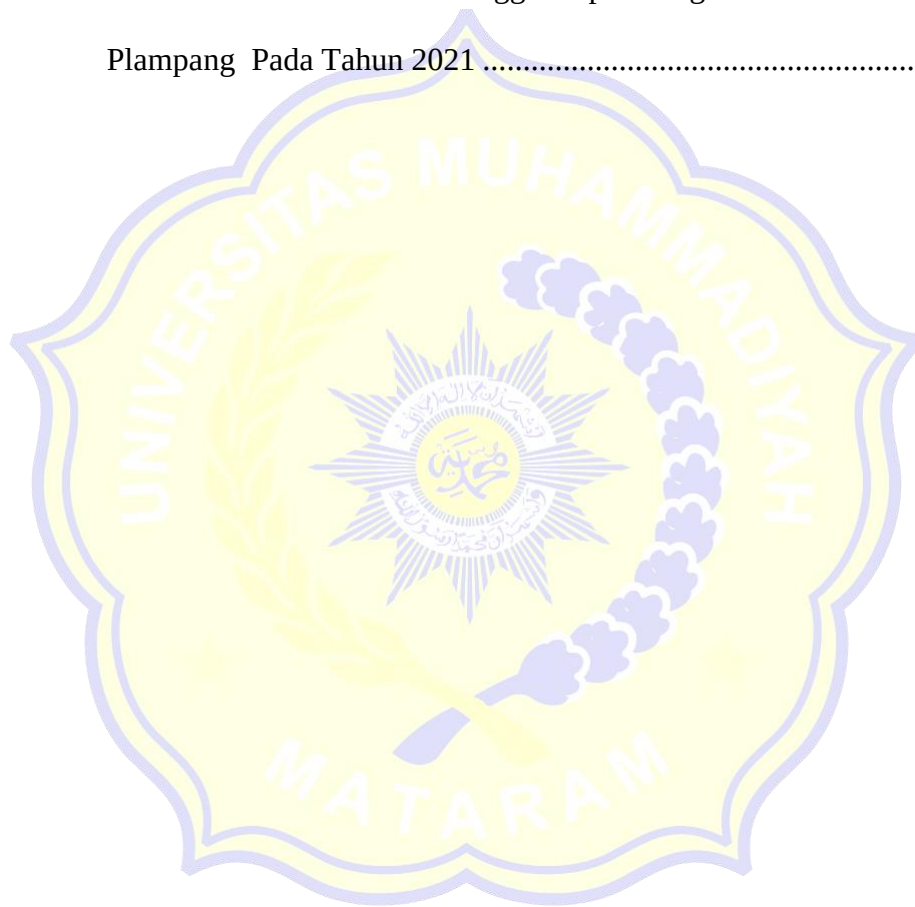


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2 Tangga Partisipasi menurut Arstein	26
Tabel 2.3 Definisi Operasional	53
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Desa Plampang Pada Tahun 2021	75
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Plampang Pada Tahun 2021	77
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Plampang Pada Tahun 2021	77
Tabel 4.4 Daftar Nama-Nama Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RKP Tahun 2021 Di Desa Plampang.	117
Tabel 4.5 Susunan Tim Penyusun RPJM Desa Di Desa Plampang Tahun 2021-2026	123
Tabel 4.6 Data Kehadiran Musyawarah RPJM Desa Plampang Tahun 2021	
Tabel. 4.7 Isu Strategi, Strategi, Arah Kebijana dan Kebijakan Umum di Desa Plampang Tahun 2021-2026.....	137
Tabel. 4.8 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Plampang Tahun Anggaran 2021	141
Tabel 4.9. APBDES Desa Plampang Tahun 2021	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	50
Gambar 4.1 Bagan Struktur Pemerintah Desa Plampang	68
Gambar 4.2. Struktur Organisasi BPD Desa Plampang	106
Gambar 4.3 Skema Proses Perencanaan anggaran pembangunan Desa Plampang Pada Tahun 2021	112



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Dokumentasi penelitian
2. Berita Acara
3. Lembar Konsultasi Penelitian
4. Surat Keterangan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Ada beberapa desa yang terletak di antara kabupaten dan kota. Desa adalah komponen yang paling tidak signifikan dari keseluruhan sistem pemerintahan; namun, meskipun ukurannya kecil, desa tetap memiliki kapasitas untuk merencanakan pertumbuhan di masa depan, serta untuk mempromosikan dan meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.

Menurut Pasal 18 UUD 1945 Bab IV pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil serta bentuk dan susunan pemerintahan adalah ditetapkan dengan undang-undang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dinyatakan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang diadopsi pada tahun 1945. hak-hak yang berkaitan dengan bangsa dan asal-usul yang khas. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan penyelenggara adalah pemerintah desa, khususnya kepala desa atau biasa disebut kepala desa. Informasi ini dapat ditemukan dalam undang-undang berjudul "UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

Hal tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Menurut informasi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia (Republik), kepala desa adalah orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah. Selain UU, konsep kejelasan hukum, pemerintahan yang tertib, ketertiban umum, transparansi, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman, dan partisipasi digunakan untuk memandu pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah Desa mampu mengelola segala sesuatu yang menyangkut sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan administrasi serta pengelolaannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, tetapi pada pengelolaan sumber daya yang ada, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan ada dua lembaga yang mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu Pemerintah Desa dan BPD dari Badan Hukum sebelumnya. Berdasarkan Landasan Hukum sebelumnya, Pemerintah Desa kini memiliki kewenangan untuk mengatur semua aspek yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan uang.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara tentang penggunaan anggaran yang di atur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 Bab IX Alokasi dana desa, kita dapat melihat bahwa dalam penyelenggaraan keuangan desa, dana yang berasal dari APBD dapat

melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mengelola atau memberikan kesempatan bersama sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat merumuskan kemana mereka harus digunakan dalam fungsi visi dan kebutuhan masyarakat di desa. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Negara Tahun 2007. Bahwa peran serta masyarakat A diperlukan untuk melaksanakan pembangunan di desa, yaitu ikut serta masyarakat dalam bidang pembangunan baik dalam hal pembangunan maupun pembangunan. perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian, diatur dalam prinsip otonomi daerah dan konstitusi, Peraturan Pemerintah (PP), dan surat edaran dari Menteri Nasional. Semua dokumen ini berasal dari sumber yang sama: Menteri Nasional.

(<https://www.kemenkeu.go.id/media/6886/informasi-apbn-2018.pdf> diakses pada hari Senin, 21 Oktober 2019 pukul 20.02 WIB).

Partisipasi masyarakat merupakan usaha yang berlandaskan gotong royong, yang keduanya merupakan ciri kepribadian negara Indonesia. Prakarsa dapat diterjemahkan sebagai kesediaan atau kesediaan untuk menginginkan, dan gotong royong dapat diterjemahkan sebagai kapasitas atau kekerabatan; oleh karena itu, perlu untuk mengaturnya. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga pengendalian pembangunan, serta tindak lanjut dan pemeliharannya. Peran serta masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada hakikatnya adalah pelaksanaan rencana kegiatan yang telah diputuskan bersama melalui

Musrenbangdes; akibatnya, penting untuk memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Sebagai akibat langsung dari hal tersebut, partisipasi dalam pembangunan desa sepanjang seluruh tahapan pelaksanaan telah diangkat menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri..

Menurut Sulaeman dkk. (2019:67), partisipasi masyarakat merupakan suatu prosedur yang dapat membantu suatu komunitas untuk mulai sadar akan keadaan dan tantangan yang dihadapinya, dan berusaha untuk mengidentifikasi jalan keluar yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah jika tidak dapat diselesaikan dalam keadaannya saat ini. Ini mungkin menjadi awal untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat (memiliki kesadaran kritis) (memiliki kesadaran kritis). Perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang ikut serta dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, seperti menyumbangkan gagasan, tenaga, waktu, keahlian, sumber daya keuangan, dan/atau materi, serta mengambil bagian dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan, merupakan perbuatan yang disebut dengan partisipasi. Partisipasi dapat berlangsung baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan. Partisipasi dapat dilakukan melalui pembuatan komentar atau dengan terlibat dalam kegiatan..

Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi, 2007:40, dalam Andidkk,2019) adalah proses yang mendorong tindakan masyarakat untuk menyadari keadaan dan kesulitan yang dihadapinya dan berusaha untuk mengembangkan jawaban atau metode untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dalam konteks institusi politik, "partisipasi publik" mengacu pada keterlibatan individu, bisnis, organisasi non-pemerintah (LSM), dan sektor sosial lainnya dalam pelaksanaan kekuasaan. Sebagian besar waktu, tujuan dari partisipasi ini adalah untuk berkonsultasi atau memberikan umpan balik (Ruvalcaba-Gomez,2019).

Dwiningrum (2011: 66) juga mengemukakan definisi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah Partisipasi penduduk lokal dalam perumusan dan pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut Ada peluang bagi setiap orang yang berpartisipasi, ada kegiatan yang dapat memenuhi kesepakatan, ada pembagian wewenang dan tanggung jawab di antara mereka yang berada dalam posisi yang setara, dan ada keterlibatan komunitas proaktif dan reaktif (artinya komunitas terlibat dalam berpikir atau bertindak).

Nusa Tenggara Barat Indoneisa (NTB) adalah sebuah provinsi yang dapat ditemukan di wilayah paling barat dari gugusan pulau yang dikenal sebagai Nusa Tenggara. Wilayah Maram, yang merupakan rumah bagi ratusan kota, berisi provinsi yang memiliki nama yang sama. Maram sendiri dibagi menjadi sepuluh distrik, yang masing-masing berisi kota. Dua pulau terbesar di wilayah provinsi Nusa Tenggara ini adalah Pulau Lombok, yang dapat ditemukan di bagian barat provinsi, dan Pulau Sumbawa, yang dapat ditemukan di bagian timur provinsi. Lima kota atau kabupaten yang berbeda dapat ditemukan di pulau Lombok. Yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sumbawa juga merupakan

bagian dari kepulauan Lombok. Penelitian ini dilakukan di Desa Plampang yang terletak di Kabupaten Sumbawa, dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan persiapan pembangunan desa. (www.ntb.bps.go.id)

Partisipasi dari masyarakat lokal merupakan topik yang sering diperdebatkan dalam berbagai konteks, baik di perkotaan maupun pedesaan. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program, yang sebaliknya akan gagal. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan atau pelaksanaan program akan sangat diperlukan agar program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan program-program yang direncanakan benar-benar terkait dengan proses pembangunan masyarakat. Karena kita dapat melihat bahwa keterlibatan ini memiliki dampak yang begitu besar, maka keterlibatan masyarakat sangat signifikan untuk tingkat keberhasilan dalam perencanaan atau program yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Hal ini karena kita dapat melihat seberapa besar pengaruh partisipasi ini. Sebagai konsekuensi langsung dari hal ini, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi hampir wajib. Peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan diperlukan jika pembangunan itu akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat untuk itu. Pendidikan masyarakat tentang maksud dan tujuan strategi tertentu, yang harus dilakukan dengan penuh perhatian, diperlukan untuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan yang sebenarnya.

Salah satu kabupaten yang membentuk provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Sumbawa. Peningkatan kinerja pembangunan daerah merupakan tujuan dari pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan, dan akan dilakukan dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunannya. Oleh karena itu, pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga penilaian capaian pembangunan sangat penting, terutama di tingkat desa, ketika mencoba untuk mempromosikan tujuan ini.

Proses pembangunan desa memasukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai salah satu tahapannya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus dipastikan terlebih dahulu oleh sejumlah pihak, pemerintah desa salah satunya, untuk memastikan bahwa partisipasi pemerintah Aldea dalam pembangunan merupakan peluang atau peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. perkembangan. Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, dalam proses pelaksanaan program dan dalam pengambilan keputusan untuk menyumbangkan sumber daya atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan tertentu, dan dalam berbagi manfaat pembangunan. program. dan menilai proyek pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil keputusan sebagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah, melaksanakan

upaya mengatasi masalah, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. rencana bagi masyarakat. Ini semua adalah contoh bagaimana partisipasi masyarakat dapat dimaknai. (<http://sumbawakab.go.id>)

Kecamatan Plampang merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa. Wilayah administratif ini terletak di bagian timur Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan berjarak 63 kilometer dari ibu kota kecamatan. Kecamatan Plampang diambil dari nama desa Plampang yang dulunya terletak di sana. Kecamatan Plampang berada pada ketinggian rata-rata 10,05 meter di atas permukaan laut (menurut petugas geografi Kompas pada 25 Agustus 1990). Kecamatan Plampang berpenduduk 27.834 jiwa dengan luas wilayah 418,69 kilometer persegi. Total ada 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Plampang. Desa-desa tersebut terdiri dari 11 desa final dan 1 desa UPT. Pada tahun 2002, kecamatan Plampang dimekarkan menjadi dua kecamatan Plampang yang berbeda, serta kecamatan Labangka. Kecamatan Plampangan dan Kabupaten Maronge mengalami pemekaran kembali pada tahun 2004, yang mengakibatkan terbentuknya dua kecamatan baru. Kecamatan Plampang terdiri dari total 12 desa, 9 di antaranya dianggap desa mandiri, 2 di antaranya dianggap desa mandiri, dan 1 desa dianggap sebagai Aldea Upt. (<http://sumbawakab.go.id>)

Perlu adanya mekanisme pendukung, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT, agar roda pemerintahan desa berjalan dengan efisien dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan di tingkat desa.

Desa. 12 Kepala Desa, 44 Kepala Dusun, 89 Kepala RW, dan 213 Kepala RT mendukung Kabupaten Plampang dalam menjalankan misinya memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat setempat. (<http://geoportalbankdatasumbawa.net/public/kecamatan/5204130> diakses pada tanggal 12 februari 2020 Pkul 19.00 WITA).

Desa Plampang merupakan salah satu desa di kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa yang memiliki banyak potensi dan permasalahan yang harus segera diatasi dalam hal penyediaan infrastruktur yang ada, karena jika dilihat dalam kebijakan struktural desa bahwa desa Plampang adalah ibukota kecamatan Plampang, oleh karena itu sangat diperlukan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat. salah satu desa yang memiliki banyak potensi dan permasalahan yang harus segera diatasi dalam hal penyediaan yang ada Karena kecamatan Plampang dimekarkan menjadi dua kecamatan yang berbeda pada tahun 2002, maka dusun Plampang memiliki banyak potensi juga sebagai kesulitan yang perlu diatasi sekarang. Plampang dan Labangka adalah nama yang diberikan kepada dua kecamatan baru yang terbentuk. Tahun 2004 terjadi pemekaran Kabupaten Plampang dan Kabupaten Maronge menjadi kecamatan masing-masing, sehingga jumlah kecamatan di wilayah tersebut bertambah menjadi empat. Kecamatan Plampang memiliki total 11 desa, sembilan di antaranya dikategorikan sebagai masyarakat yang mengandalkan ekonomi mandiri. Karena populasi yang terus meningkat, ada kebutuhan mendesak untuk memperluas jumlah lahan yang sekarang dapat diakses. Sebagai akibat

langsung dari hal ini, jumlah keseluruhan lahan akan mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Karena tanah merupakan salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi tuntutan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan rumah, serta kebutuhan akan fasilitas penunjang lainnya, maka tanah merupakan salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat. Desa Plampang berpenduduk 5.649 jiwa dan menempati wilayah seluas 4.524,4 hektar.(<http://desa-plampang.sumbawakab.go.id>).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat di desa Plampang di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa masih terdapat permasalahan atau masih terdapat kendala atau faktor atau faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. . Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai atau kurangnya respon dari masyarakat, masih banyak kendala yang terjadi dalam pembangunan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Diantaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi langsung membantu pemerintah, kurangnya gotong royong yang mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur. Mengingat keadaan, pendekatan yang diambil oleh pemerintah desa harus direvisi.

Peran serta masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan berhasil tidaknya beberapa aspek pembangunan di suatu desa, antara lain pembangunan infrastruktur dan penggarapan sumber daya manusia (SDM).

Dalam skenario ini, pendekatan yang akan digunakan pemerintah desa adalah pendekatan yang dinamis. Pemerintah desa perlu dapat memberikan saran dan arahan, serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi dalam hal sumber daya, dalam hal administrasi dan koordinasi, serta partisipasi dalam program-program pembangunan, diharapkan strategi pemerintah akan fokus pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pembangunan desa. Secara khusus, strategi tersebut diharapkan akan melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pembangunan desa. Diharapkan masyarakat akan diterima untuk terlibat dalam proses mewujudkan program pembangunan dengan menawarkan waktu, tenaga, aset, sumber daya, dan informasi serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan apa yang telah ditentukan bersama.

Sebagai subyek pembangunan, anggota masyarakat tentunya harus dilibatkan dalam proses penentuan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan obyektif masyarakat yang dituju, dalam arti perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. , agar program-program perencanaan pembangunan rakyat yang akan dicanangkan, masyarakat dapat menjamin secara optimal, karena itu perencanaan pembangunan rakyat di Plampang direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat yang tinggal disana. Partisipasi aktif dalam tahap akhir pelaksanaan pembangunan desa.

Kemudian, tahap partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dana desa (ADD) di desa plampang, Kec. plampang, Kab. Sumbawa, sangat penting untuk merencanakan bagaimana dana yang ada digunakan sesuai dengan apa yang disusun desa yang telah dikompilasi, serta merencanakan program. Proses realisasinya juga diharapkan kepala desa dapat menciptakan ide atau program pembangunan, dalam hal pelaksanaan perencanaan masyarakat mengenai penggunaan anggaran pembangunan dana desa seperti yang ditunjukkan di atas, khususnya masyarakat dapat menjamin perencanaan pembangunan (Musren Gbangdes) Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pelaksanaan program dan perencanaan perencanaan dan pelaksanaan itu sendiri, pembangunan diharapkan kepala desa dapat menciptakan ide atau program pembangunan. Pembinaan juga diharapkan kepala desa dapat menciptakan ide atau program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat ditentukan jika program dalam pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimungkinkan juga untuk menentukan bahwa tujuan pembangunan juga akan tercapai dengan rencana penelitian ini untuk tingkat partisipasi masyarakat di Plampang, Kecamatan Plampang, Sumbaw. Berkaitan dengan peran serta masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program pembangunan desa, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan program pembangunan desa.

Selain itu, dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik individu sebagai komponen masyarakat, penting untuk mempelajari pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat partisipasi dalam pengembangan dana di desa jika penting untuk mempelajari jumlah laporan, yang beragam. Hal ini penting karena penting untuk mempelajari pengaruh karakteristik individu terhadap tingkat partisipasi dalam pengembangan dana di desa, sesuai dengan tanggung jawab yang juga penting diemban oleh aparat pemerintah desa, oleh karena itu pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan tersebut, agar rencana anggaran pemerintah desa untuk pembangunan pemerintahan terlaksana. . dan adanya poin-poin penting dalam perencanaan keuangan desa tentunya sesuai dengan tanggung jawab yang juga penting diemban oleh aparat pemerintah desa. (Good village Governance).

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran Pembangunan di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka peneliti didalam melakukan suatu rencana penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2021, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran pembangunan desa di desa Plampang yang terletak di kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa?
2. Apa saja kendala yang menghambat pelibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran pembangunan desa dan apa saja variabel yang mendorong partisipasi masyarakat tahun 2021 di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan perencanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan anggaran pembangunan desa di Desa Plampang yang terletak di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa tahun 2021.
2. Pada tahun 2021, tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran pembangunan desa dan mana yang mendorongnya di Desa Plampang yang terletak di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas, maka peneliti dapat menguraikan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Subyektif

Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk

mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan adalah telah menyelesaikan magang.

2. Manfaat praktis

- a. Penyebarluasan informasi atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan refleksi masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam perancangan anggaran pembangunan di Desa Plampang Kecamatan Plampang Tahun 2021.
- b. Untuk lebih meningkatkan pemikiran, menumbuhkan mentalitas yang dinamis, dan belajar tentang kapasitas penulis untuk menerapkan informasi yang diperoleh dalam perkuliahan.

3. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Mereka juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru.

4. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan ilmu politik, khususnya dalam hal pelibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran pembangunan dengan mekanisme penyusunan RKPDES, RPJMDES, dan penyusunan APBDES dalam perencanaan anggaran pembangunan.
- b. Ini mungkin berfungsi sebagai titik referensi untuk pembuatan atau produksi proyek penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang telah dilakukan di masa lalu dan dianggap cukup relevan. Hal ini sering digunakan untuk membuat perbandingan dan khususnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian baru. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu penelitian dalam posisi penelitian dan menunjukkan "orisinalitas penelitian".

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
	Zoebir (2017)	“Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Identifikasi Indikator-indikator Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)”.	Regulasi pembangunan harus fokus pada masyarakat, yang tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangkaian penyusunan beberapa regulasi di daerah, harus didukung oleh perangkat pemerintah (daerah) sebagai upaya yang baik untuk memobilisasi kemandirian Riger yang mandiri. Komunitas Masyarakat Kepatuhan dan Implementasi Hukum saja. Sehingga upaya ini dinyatakan dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Keyakinan terhadap BBB perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melengkapi segala bentuk pembangunan reformasi daerah di kota dan

			kecamatan. Kemudian, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengeksekusinya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya yang diperlukan tidak akan mudah untuk dilakukan, seperti memutar telapak tangan, tetapi membutuhkan waktu yang lama dengan proses makan. Waktu, tenaga, dan ide habis. Ini hanya akan dilakukan oleh administrasi yang memiliki hati yang nyata dan memiliki informasi yang lebih baik.
2	Penelitian oleh Fathurrahman (2018)	Partisipasi Masyarakat pada Musrembang Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.	Keterkaitan yang berada dalam kekuatan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik yang dialokasikan oleh sistem demokrasi dikenal sebagai partisipasi. Dalam sebuah negara yang menganut bentuk pemerintahan demokratis, ada kalanya pemerintah pusat berperan aktif dalam pengelolaan rakyatnya, dan ada kalanya pemerintah pusat memberi ruang kepada pemerintah daerah agar otoritas tersebut dapat menangannya. tantangan yang dihadapi komunitas mereka dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan keadaan tertentu. Sekumpulan orang yang bersatu dan terikat satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa kepedulian di antara individu-individu dalam bidang budaya, ekonomi, sosial, dan lainnya disebut sebagai masyarakat.

3	Penelitian oleh Ahmad Mustamin (2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang	Keterlibatan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan, serta dalam desain dan pelaksanaan setiap program kerja yang dilakukan di masyarakat. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana perasaan dan emosi seseorang dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan, dan di mana seseorang berusaha untuk mendapatkan tanggung jawab dalam suatu organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Gagasan keterlibatan dalam proses evolusinya mungkin menandakan banyak hal yang berbeda, namun dalam konteks tertentu maknanya mungkin sebanding. Ada sekitar tiga konotasi berbeda yang mungkin melekat pada pengertian partisipasi ketika membahas pembangunan.
4	Merry agustin (2016)	“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrebangng Studi Kasus Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir	Masyarakat Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk keterlibatan dalam setiap aspek pembangunan, termasuk perencanaan dan bentuk kegiatan lain yang terkait dengan pembangunan. pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi dari masyarakat, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan pinjaman untuk efisiensi operasi layanan yang disediakan oleh pemerintah. Akses jalan merupakan salah satu fokus utama

		Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan”	Program Pembangunan Jalan Poros Desa di Desa Tunggunjagir yang terletak di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Tujuan akhir program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
5	Tikka Dessy dan yuta Lilasari (20190	peran musyawarah perencanaan pembangunan dan tata kelola perekenomian Desa Pulongdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	Tahap awal pembangunan di Desa Pulongdowo dimulai dengan proses pengumpulan aspirasi masyarakat desa. Aspirasi tersebut kemudian dikomunikasikan kepada lembaga permusyawaratan desa sebagai perwakilan masyarakat desa. Kajian organisasi tersebut membahas kondisi wilayah serta keluhan masyarakat.

2.2 Dasar Teori

2.2.1. Konsep Partisipasi

Dalam proses pembangunan, partisipasi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan fokus utama pembangunan masyarakat. Pengembangan masyarakat dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki situasi yang saat ini dalam kondisi kurang ideal. Partisipasi dari anggota masyarakat dengan demikian merupakan salah satu faktor yang dapat berperan dalam menentukan efektifitas suatu program atau proses pembangunan. Hal ini sesuai dengan pengertian keterlibatan yang akan dikemukakan oleh sejumlah otoritas dalam paragraf berikut.

Keterlibatan didefinisikan oleh Pathurrahman (2017: 196) sebagai tindakan untuk mengambil bagian, khususnya suatu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan dengan tujuan menuai keuntungan dari partisipasi tersebut. Adisasmita (2016:34) menyatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatan dalam merencanakan dan melaksanakan program/proyek pembangunan yang dilakukan di masyarakat setempat. Sementara itu, ia mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi, sebagaimana didefinisikan oleh Rahmah D. (2019: 31-32), adalah keterlibatan satu orang atau lebih dalam suatu tindakan.

Keterlibatan dapat berbentuk keterlibatan mental, emosional, dan fisik dalam penggunaan semua kekuatannya (inisiatif) dalam semua tindakan yang dilakukan, dan itu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan mendorong asumsi tanggung jawab atas keterlibatan apa pun. H.A.R Tilaar (2019: 287) mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan bentuk keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang dituntut antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan melibatkan masyarakat dalam proses Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat. Partisipasi merupakan bentuk keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi. Berdasarkan pemikiran tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi mengacu pada partisipasi atau keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas masing-masing orang tanpa harapan bahwa mereka harus mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk melakukannya. Tingkat partisipasi dalam tujuan yang telah disepakati akan ditingkatkan semaksimal mungkin. Dalam konteks penelitian ini, istilah "partisipasi" mengacu pada kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh warga Desa Plampang, Kecamatan Plampang, dan Kabupaten Sumbawa selama proses pelaksanaan rencana pertumbuhan kota. Tingkat partisipasi dalam suatu program akan menentukan tingkat keberhasilannya.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut meliputi partisipasi finansial, partisipasi dalam kepemilikan, partisipasi dalam energi, partisipasi dalam keterampilan, partisipasi dalam berpikir, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi perwakilan.

Menurut berbagai macam partisipasi yang telah dibahas sebelumnya, partisipasi dapat dibagi menjadi dua kategori: jenis partisipasi yang ditawarkan dalam bentuk nyata dan bentuk partisipasi yang tidak diberikan dalam bentuk fisik (memiliki bentuk). Uang, properti, energi, dan bakat adalah contoh jenis keterlibatan fisik. Di sisi lain, partisipasi berpikir, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi perwakilan adalah contoh bentuk partisipasi yang lebih tidak berwujud.

Yang dimaksud dengan "partisipasi gagasan" adalah partisipasi dalam bentuk sumbangan gagasan, pendapat, atau pemikiran yang membangun, baik untuk mengembangkan program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program, serta mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk mengembangkan program. kegiatan yang diikuti. Komunitas berpartisipasi dalam setiap debat dan forum untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang memungkinkan mereka untuk membuat pilihan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama mereka. Keterlibatan perwakilan

dalam suatu organisasi atau komite dicapai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada posisi perwakilan tersebut dalam organisasi atau komite.

Sementara itu, Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016: 60), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagian besar tentang mengidentifikasi banyak jalan yang terbuka bagi masyarakat untuk mencapai konsensus tentang ide-ide tertentu tentang minat dan perhatian bersama. Karena masyarakat harus memiliki suara dalam menentukan arah pengelolaan dan pertumbuhan, partisipasi dalam pengambilan keputusan sangat penting. Tuntut hak Anda untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan arah pertumbuhan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan pilihan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kehadiran dalam pertemuan, partisipasi dalam debat, pemberian ide, atau penerimaan atau penolakan terhadap program yang sedang dipresentasikan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik dari segi perencanaan maupun tujuan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program, sangat penting untuk memasukkan sejumlah komponen, terutama pemerintah dalam kapasitasnya sebagai sumber atau sumber utama pembangunan.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan kuantitas pencapaian yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan program. Dari segi kuantitas keberhasilan suatu program dapat dilihat seberapa besar proporsi keberhasilan program yang dijalankan, sedangkan dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan terlihat dari peningkatan keluaran. Ini semua sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Pelaksanaan program secara keseluruhan terkait dengan partisipasi dalam penilaian ini, yang sedang dilakukan saat ini. Tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk menentukan apakah pelaksanaan program yang sebenarnya sesuai dengan rencana yang dibayangkan, atau apakah ada penyimpangan dari pandangan yang telah dipegang sebelumnya; jenis partisipasi dapat ditentukan berdasarkan hasil, yaitu,:

- a. Tindakan keterlibatan mengambil bentuk sesuatu yang fisik (memiliki bentuk). Jenis keterlibatan nyata, seperti uang, properti, tenaga kerja, dan bakat, diterima.
- b. Partisipasi gagasan, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi perwakilan merupakan contoh bentuk partisipasi yang tidak asli.

2.2.3 Tingkatan Partisipasi

Sejauh mana masyarakat telah berpartisipasi dalam proses pembangunan sebagai salah satu faktor keberhasilan pembangunan harus

dipahami oleh pelaku pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan derajat harapan masyarakat sangatlah penting. Telah ditunjukkan oleh Wilcox dan Theresia (2019: 202) bahwa ada lima (5) derajat keterlibatan yang berbeda, yaitu:

1. Membuat informasi tersedia (information).
2. Konsultasi (konsultasi); juga dikenal sebagai memberikan pemikiran dan menjadi pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik; namun, tanpa terlibat dalam proses aktual dalam mewujudkan pemikiran dan gagasan tersebut ke dalam tindakan.
3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama (juga dikenal sebagai "memutuskan bersama"), dalam arti memberikan dukungan pada konsep, ide, dan opsi sambil juga mengembangkan peluang yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
4. Melakukan bersama (acting together); tidak hanya dalam arti terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam arti aktif dalam pelaksanaan tindakan dan membangun kemitraan dalam usaha ini.
5. Memberikan bantuan (berupa dukungan untuk kepentingan masyarakat yang mandiri); dalam kasus ketika organisasi lokal menawarkan bantuan keuangan, nasihat, dan bentuk bantuan lain untuk menyusun agenda kegiatan.

Sementara itu, menurut Arstein, tindakan berpartisipasi dalam komunitas seseorang dapat dipecah menjadi beberapa tahap berikut:

Tabel 2.2
Tangga Partisipasi menurut Arstein

Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
Citizen Power	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan Wewenang antarmasyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan	Kontrol masyarakat (<i>citizen control</i>) Pelimpahan kekuasaan (<i>delegated control</i>) Kemitraan (<i>partnership</i>)
Tokenism	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Penetraman (<i>placation</i>) Konsultasi (<i>consultation</i>) Informasi (<i>information</i>)
<i>Non Participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan objek	Terapi (<i>therapy</i>) Manipulasi (<i>manipulation</i>)

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Pangestu (2017) dari Febriana (2018) menguraikan unsur-unsur utama yang mungkin berpengaruh pada keterlibatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Variabel internal adalah segala sesuatu yang mengandung kualitas individu dan dapat mempengaruhi orang dengan cara apapun untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Faktor eksternal adalah segala

sesuatu yang dapat mempengaruhi individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Meskipun ada sejumlah elemen eksternal yang mungkin berdampak pada keterlibatan masyarakat, salah satunya adalah hubungan yang sudah ada antara manajer proyek dan audiens target.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu program dapat dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang berbeda; beberapa faktor ini, menurut sifatnya, dapat berkontribusi pada keberhasilan program; di sisi lain, ada orang-orang tertentu yang dapat bekerja untuk merusak keberhasilan program. Misalnya kriteria seperti umur, ketersediaan komoditas, tingkat pendidikan, profesi, dan pendapatan.

Menurut Angel (2017) yang dikutip oleh SACA Firmansyah (2019), perkembangan keterlibatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak elemen yang berbeda. Pola keterlibatan seseorang mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berbeda, yaitu:

a. Usia

Usia seseorang merupakan salah satu karakteristik yang berperan dalam menentukan bagaimana perasaan mereka terhadap berbagai aktivitas sosial yang ada sekarang. Mereka termasuk dalam kelompok usia menengah ke atas, yang memiliki ikatan moral dengan cita-cita dan standar masyarakat yang lebih mapan, dan mereka memiliki kecenderungan untuk terlibat lebih banyak daripada kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Artinya bagi banyak orang, peran perempuan terutama berkaitan dengan rumah tangga, nilai dominan yang sudah berlangsung lama dalam budaya berbagai negara menyatakan bahwa pada dasarnya, tempat perempuan adalah “di dapur”. Namun, nilai-nilai peran perempuan semakin tergeser seiring dengan emansipasi dan peningkatan pendidikan perempuan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perempuan menjadi lebih berpendidikan.

c. Pendidikan

Sebagai salah satu prasyarat yang tak terbantahkan untuk ambil bagian, ini disebutkan. Orang percaya bahwa menerima pendidikan dapat mengubah perspektif seumur hidup seseorang tentang dunia di sekitar mereka, yang merupakan perspektif yang penting untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Kedua hal ini terkait erat karena pekerjaan seseorang secara langsung mempengaruhi jumlah uang yang dibawa orang tersebut setiap tahun. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat mungkin bermanfaat bagi situasi profesional dan keuangan seseorang, serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mengakui bahwa terlibat dalam kegiatan tertentu membutuhkan keberadaan infrastruktur ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan Partisipasi

Menurut Slamet dan Theresia (2017:207) perluasan dan pertumbuhan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagian besar dikendalikan oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Komunitas akan memiliki pilihan untuk berpartisipasi, yang akan diberikan kepada mereka
2. Ada indikasi bahwa anggota masyarakat tertarik untuk ambil bagian
3. Ada kesempatan bagi anggota masyarakat untuk ambil bagian

Sementara itu, Najib mencatat dalam Tanuwijaya (2016: 7) bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai oleh community engagement sangat ditentukan oleh:

- a. Siapa yang pertama kali mengajukan gagasan partisipasi; apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Kepentingan siapa yang dilayani oleh keterlibatan itu, apakah untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat.
- c. Siapa pun yang berwenang, apakah itu pemerintah federal, pemerintah daerah, atau lembaga donor, seringkali lebih mudah untuk mencapai tujuan seseorang dalam pengaturan di mana pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (LSM) bertanggung jawab. Kenyataannya, mereka seringkali memiliki pemahaman yang baik tentang isu, situasi, dan kebutuhan daerah atau komunitas terkait dengan pihak ketiga.

- d. Hubungan yang terjalin antara komunitas dan badan pengelola, serta tingkat kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap badan pengelolanya. Dalam hal hubungan ini positif, pelaksanaan partisipasi akan lebih sederhana.
- e. Area budaya di mana orang memiliki sejarah keterlibatan (dalam proses pengambilan keputusan melalui debat) seringkali tidak terlalu sulit dan lebih tahan lama.
- f. Politik yang stabil, dan pemerintahan yang demokratis yang sesuai dengan standar terbuka, menghargai keragaman, dan menghormati semua orang.
- g. Legalitas dan ketersediaan undang-undang yang memungkinkan keterlibatan publik dalam manajemen pembangunan dan mengejar norma-norma tersebut (terintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).
- h. Di bidang ekonomi, terdapat prosedur yang memberikan akses bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk berpartisipasi atau menjamin bahwa mereka akan mendapat untung (baik langsung maupun tidak langsung) sebagai akibat dari keterlibatan mereka.
- i. Kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang diakui dan memiliki komitmen untuk memajukan dan melaksanakan partisipasi, dapat berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat itu sendiri, atau tokoh masyarakat.
- j. Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya dilakukan dalam jangka

waktu yang pendek tetapi juga dalam jangka waktu yang panjang.

- k. Tersedianya jaringan yang menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat (forum warga).

2.2.6 Faktor Penghambat Partisipasi

Menurut Soetrisno di Theresia (2017: 211), ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat terwujud sepenuhnya, yaitu:

1. Fakta bahwa rasa keterlibatan yang sebenarnya tidak dimasukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan kendala utama yang harus diatasi untuk berhasil membangun keterlibatan masyarakat.
 - a. Dalam konteks perencanaan pembangunan, yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah kesediaan masyarakat untuk mendukung sepenuhnya pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini membuat masyarakat dalam posisi pasif dan tunduk sepenuhnya pada otoritas pemerintah.
 - b. Pembangunan yang dibuat dan diputuskan oleh pemerintah diartikan sebagai kebutuhan masyarakat selama pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pembangunan yang dipahami dan ditentukan oleh masyarakat diartikan sebagai keinginan masyarakat yang mendapat prioritas lebih rendah.
 - c. Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang tidak memperhatikan

subsistem yang berada di bawah suprasistem, dan di mana aspirasi masyarakat cukup untuk dikomunikasikan dalam perencanaan dan dalam pekerjaan pembangunan. . Jenis kerjasama ini tidak memperhatikan sub sistem yang berada di bawah supra sistem.

2. Penciptaan pembangunan sebagai ideologi baru yang harus dikawal ketat, yang mendorong aparat pemerintah menjadi otoriter, merupakan persoalan kedua yang perlu dibenahi.
3. Isu ketiga adalah menjamurnya peraturan perundang-undangan yang mengurangi keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan.

Sementara itu, Dwiningrum (2021: 57) membahas alasan yang antara lain mempersulit anggota masyarakat untuk berpartisipasi:

- a. Malas, tidak peduli, kurang informasi, dan tidak tertarik mempelajari hal-hal baru sebagai anggota masyarakat yang ragu-ragu untuk melakukan penyesuaian.
- b. Aspek yang berkaitan dengan tipologi
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
- d. Demografis (jumlah penduduk)
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Sementara Solekhan (2017: 135), mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

1. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Tempat partisipasi masyarakat adalah kawasan yang berfungsi

sebagai wadah berbagai masyarakat dan organisasi untuk mengambil bagian dalam proses pembentukan pemerintahan dan pembangunan desa. Konsep "ruang" dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada lokasi fisik (tempat), tetapi juga pada forum diskusi online dan bentuk media lain yang memberikan kemampuan kepada individu untuk mengakses informasi secara terbuka dan objektif. Jenis forum yang paling sering digunakan oleh masyarakat dikenal sebagai “Musrenbangdes”, namun pelaksanaan rencana tersebut sebagian besar bersifat simbolis dan formalitas sederhana. Akibat langsung dari hal tersebut, Forum Musrenbangdes tidak mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.

2. Melemahnya modal sosial

Modal Saham adalah sistem norma, jaringan, dan organisasi, di mana individu memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, di mana pengambilan keputusan dan kebijakan dilakukan dalam konteks interaksi sosial, seperti yang dikemukakan oleh Bardhan dalam Solekhan (2017: 139).

2.3 Tinjauan Tentang Masyarakat

Istilah "bisnis" dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin "socius", yang berarti "asosiasi" (teman). Kata bahasa Inggris "komunitas" berasal dari kata Arab "Syaraka," yang berarti "perkumpulan" (peserta dan peserta). Orang-orang yang bergaul satu sama lain, atau, dengan kata-kata yang lebih akurat secara teknis, berinteraksi satu sama lain, membentuk suatu masyarakat. Warga dapat berkomunikasi satu sama lain melalui

infrastruktur yang mungkin dimiliki oleh unit manusia. Masyarakat juga dapat dilihat sebagai suatu kesatuan eksistensi manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat tertentu yang berlangsung terus menerus dan terhubung dengan rasa identitas bersama. Ini adalah salah satu definisi masyarakat. Community adalah unit perusahaan yang dapat dicirikan oleh empat kualitas berikut, yaitu:

- 1) Interaksi antara penduduk lokal dan pemerintah mereka,
- 2) Adat istiadat,
- 3) Arus Waktu yang Tak Terputus,
- 4) Perasaan identitas yang kuat yang dimiliki oleh semua orang dan berfungsi untuk menyatukan mereka.

Definisi masyarakat Ralph Linton, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Soerjono Soekanto (2016:22), mendefinisikannya sebagai “semua kelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama dalam waktu yang lama, agar mereka dapat mengorganisir diri dan menganggap diri mereka sendiri. suatu unit sosial dengan batas-batas tertentu.” Menurut Soerjono Soekanto (2016:22), di Soerjono Soekanto adalah orang-orang yang hidup berdekatan satu sama lain, menciptakan budaya, dan berbagi wilayah, identitas, adat istiadat, tradisi, sikap, dan rasa kesatuan yang sama dengan landasan yang sama.

Sementara ini, Djodiguno menegaskan bahwa masyarakat adalah puncak dari semua interaksi yang terjadi dalam keberadaan manusia dengan individu lain (dalam Abu Ahmadi: 2018: 97). Dapat ditarik kesimpulan

bahwa yang dimaksud dengan istilah “perusahaan” adalah sekelompok orang yang telah lama tinggal di suatu wilayah yang sama dan bekerja sama, mempunyai pembagian kerja sehingga dapat berorganisasi. , dan telah berbagi adat, tradisi, sikap, dan rasa persatuan. Hal ini berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. selanjutnya untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Masyarakat

Menurut Soemardjan dalam Soikanto (2018:49), orang-orang yang tinggal di Indonesia dapat digolongkan menjadi salah satu dari tiga kelompok: mereka yang hidup dalam masyarakat sederhana, mereka yang hidup dalam masyarakat kelas menengah, dan mereka yang tinggal di salah satu peradaban pra-modern atau modern. Berikut ini adalah daftar fitur utama dari masyarakat ini:

1. Masyarakat Sederhana
 - a. Baik hubungan di dalam keluarga maupun di seluruh komunitas pada umumnya memiliki kualitas yang sangat tinggi.
 - b. Adat-istiadat adalah elemen fundamental yang menjadi sandaran tatanan sosial, dan mereka dikembangkan sebagai respons terhadap tradisi.
 - c. Ada kepercayaan yang kuat akan kekuatan supernatural yang mempengaruhi kehidupan manusia tetapi tidak dapat dikendalikan olehnya, tidak ada lembaga khusus yang memberikan pendidikan di bidang teknologi, dan keterampilan diturunkan dari orang tua

kepada anak-anak melalui praktik dengan sedikit teori dan pengalaman serta bukan dari hasil yang dipikirkan atau dicoba.

- d. Persentase orang yang tidak bisa membaca atau menulis cukup tinggi.
- e. Hukum yang ditegakkan adalah tradisi lisan, tidak terlalu rumit, dan prinsip-prinsip dasarnya diketahui dan mudah dipahami oleh hampir semua warga negara dewasa.
- f. Uang sebagai alat tukar dan cara mengukur harga hanya memainkan peran yang sangat kecil dalam perekonomian, karena sebagian besar output dalam perekonomian ini dilakukan baik untuk konsumsi pribadi keluarga atau untuk pasar lokal kecil.

2. Masyarakat Madya

- a. Hubungan di dalam keluarga masih cukup sehat, namun hubungan dengan lingkungan dan masyarakat sudah mulai memburuk dan menunjukkan tanda-tanda hanya dimotivasi oleh pertimbangan finansial.
- b. Orang-orang masih menghormati tradisi mereka, tetapi mentalitas mereka menjadi lebih mudah menerima ide-ide baru dari tempat yang lebih jauh.
- c. Kepercayaan pada kemampuan supernatural adalah sesuatu yang hanya berkembang ketika manusia telah kehabisan semua kemungkinan penjelasan lain tentang bagaimana memecahkan suatu masalah, mengingat pertumbuhan rasionalitas sebagai metode

berpikir.

d. Ada lembaga pendidikan di masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan formal hingga setingkat sekolah menengah pertama; namun, masih relatif sedikit sekolah yang memberikan pengajaran di bidang keterampilan atau kejuruan.

e. Persentase orang yang buta huruf telah menurun akhir-akhir ini.

f. Hukum tidak tertulis secara bertahap dilengkapi dengan hukum tertulis.

g. Ekonomi lokal menawarkan penduduk lebih banyak alternatif pekerjaan

h. produksi untuk pasar, yang pada gilirannya mulai menghasilkan divergensi dalam struktur masyarakat; juga, uang memainkan bagian yang semakin penting dalam masyarakat saat ini.

3. Masyarakat pra modern/modern

a. Mengejar kepentingan sendiri adalah motivasi utama dalam interaksi manusia.

b. Hubungan dengan kelompok tetangga dilakukan secara bebas dalam lingkungan yang bercirikan pengaruh yang setara dan timbal balik.

c. Keyakinan yang kuat akan potensi kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk memperbaiki kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

d. Ada banyak pekerjaan dan keterampilan berbeda yang digunakan

untuk mengkategorikan komunitas; masing-masing dapat diperoleh atau ditingkatkan di fasilitas pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan pelatihan kejuruan.

- e. Jumlah rata-rata tahun yang dihabiskan di sekolah agak tinggi, dan bahkan.
- f. Peraturan perundang-undangan yang harus diikuti pada hakikatnya adalah hukum tertulis yang sangat rumit.
- g. Mayoritas perekonomian beroperasi pada sistem pasar bebas.
- h. tergantung pada penggunaan berbagai bentuk uang dan mekanisme pembayaran lainnya.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perusahaan adalah interaksi yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah bekerja bersama di lokasi yang sama untuk jangka waktu yang lama dan telah tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. jumlah waktu. Selain itu, ada norma dan cita-cita yang direferensikan oleh cara seseorang bertindak.

2.4 Tinjauan Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

2.4.1. Konsep Desa

Istilah "desa" berasal dari kata Sansekerta "Deca," yang dapat diterjemahkan berarti "tanah air," "tanah air," atau "tanah air." Widjaya (2016: 3) menegaskan bahwa desa harus dianggap sebagai komunitas hukum karena memiliki pengaturan unik yang didasarkan pada hak-hak tertentu. Selain itu, Widjaya (2017: 3) mengatakan bahwa landasan

pemikiran tentang pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi otonom, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Itulah lima pilar pemikiran tentang pemerintahan desa.

Tentang desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa Dalam Pasal 1 dengan tegas dinyatakan bahwa “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan daerah, -hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.” [rujukan?] Desa ini merupakan self-governing community yang juga merupakan regulated community, artinya desa memiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Kedudukan desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam pelaksanaan otonomi daerah.

2.4.2. Bentuk-Bentuk Desa

Bentuk-bentuk desa menurut Sugihen (2020) adalah:

a. Desa Sederhana (pra desa)

Dusun yang termasuk dalam kategori ini dikenal sebagai koloni sementara; mungkin Hanaya digunakan sebagai tempat peristirahatan saat bepergian karena penghuninya memiliki kecenderungan untuk berpindah-pindah secara teratur; Namun, lokasi akhirnya akan sepi. Jenis solusi penyelesaian ini masing-masing memiliki ciri khasnya

sendiri. Karena semua penghuni akan bermigrasi lagi setelah panen selesai atau jika tanah, yang merupakan sumber utama mata pencaharian, tidak lagi memberikan hasil yang cukup, hampir tidak ada orang yang tinggal di sana atau yang telah menetap di sana dengan miliknya atau keluarganya. Karena sifat dari bisnis ini, tidak mungkin untuk menumbuhkan atau mengembangkan berbagai organisasi sosial dan sosial atau organisasi atau lembaga sosial yang mendukung kehidupan sosial di bidang-bidang seperti pendidikan, ekonomi, adat istiadat, dan hubungan sosial di Selain tatanan sosial yang stabil.

b. Desa Swadaya

Karena ada kedamaian dan ketenangan di desa, dapat disimpulkan bahwa sudah ada komunitas (keluarga) yang menetap di dalam struktur tersebut. Koloni-koloni ini pada umumnya masih bersifat tradisional dalam arti sumber mata pencaharian utama masyarakat masih erat kaitannya dengan pertanian. Ini termasuk produksi kompleks hasil hutan, peternakan, dan budidaya ikan di kolam kecil. Selain itu, sebagian besar penduduk masih melakukan kegiatan ini. Tenaga hewan dan manusia merupakan sumber energi utama bagi teknologi pertanian yang saat ini dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan teknologi pertanian yang digunakan saat ini masih sangat primitif. Kebiasaan sering menjadi dasar untuk hubungan antara orang dan/atau organisasi (bisnis) dan berfungsi untuk menghubungkan hubungan tersebut. Belum memungkinkan untuk menggunakan

tingkat pendidikan sebagai indikasi tipologi desa, dan masyarakat seperti itu terletak cukup jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Sebagai konsekuensi langsung dari ini, infrastruktur seringkali tidak memadai dan tidak memadai.

c. Desa Swakarya

Dalam komunitas khusus ini, norma-norma dan praktik-praktik yang menjadi kerangka kehidupan sosial mulai bergeser sebagai respons terhadap perubahan-perubahan dalam banyak aspek kehidupan sosiokultural lainnya. Adat telah cukup santai sehingga sekarang dapat berhasil mempengaruhi dan menentukan model perilaku anggota masyarakat. Kesempatan kerja sudah mulai lebih beragam dari yang dibutuhkan masyarakat.

d. Desa Swasembada

merupakan program desa yang paling efektif untuk permukiman yang terjebak. Infrastruktur desa tertata dengan sangat baik, dan meskipun desain perumahan semuanya berbeda, mereka memenuhi kriteria untuk koloni yang sukses. Sejumlah besar orang telah menyelesaikan sekolah menengah. Mayoritas individu memiliki beberapa jenis mata pencaharian yang berbeda.

Dia tidak lagi bergantung pada keberhasilan industri pertanian, yang telah dia pelihara secara pribadi, untuk mempertahankan keberadaannya. Orang-orang dari luar desa dipersilakan untuk bergabung dengan komunitas desa mandiri yang sudah terbuka untuk

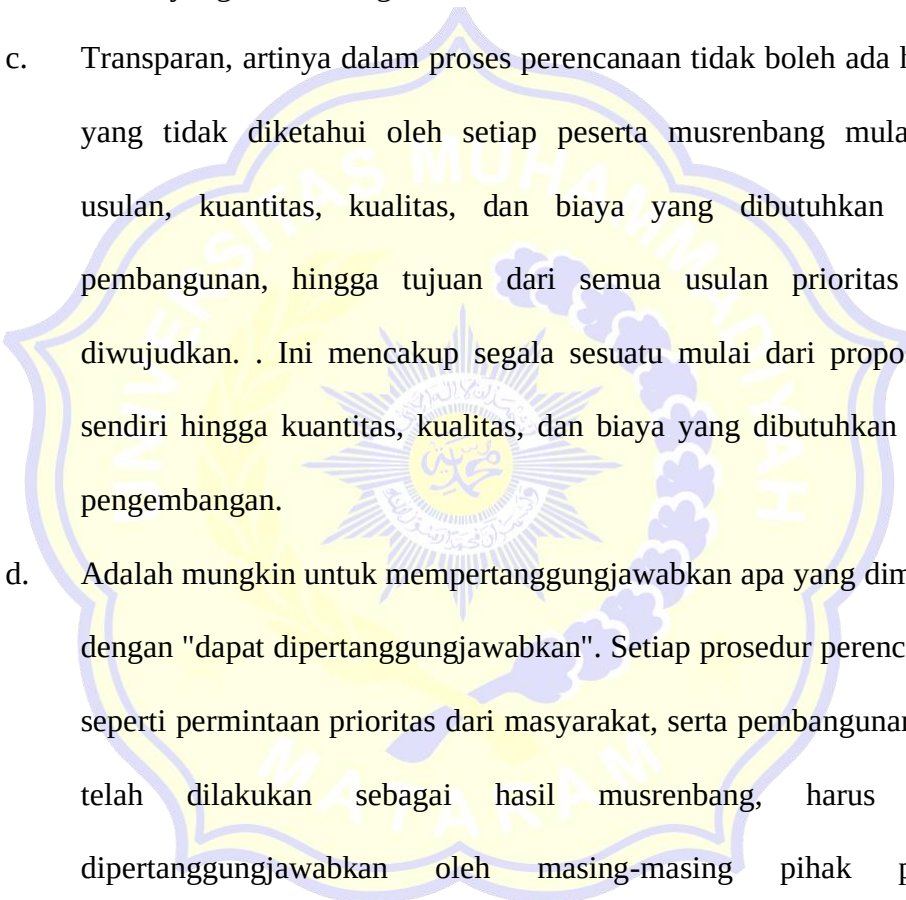
orang luar. Perilaku masyarakat desa yang mulai memanfaatkan teknologi modern ternyata dipengaruhi dari luar, meskipun teknologi tersebut belum tersebar secara universal. Ada akses mudah ke transportasi umum, dan sejumlah besar individu menggunakan berbagai instrumen komunikasi, seperti telepon dan televisi berwarna yang terhubung ke antena parabola. Dan sejumlah besar individu yang telah menjadi akademisi.

2.4.3. Definisi Perencanaan Pembangunan

Menurut argumentasi yang dikemukakan oleh Dwidjowijoto (2017: 67), “perencanaan yang baik dapat dikaitkan dengan suatu perjalanan yang telah melewati jalan yang telah melewati jalan tersebut, selebihnya akan melaksanakan dan mengatur”. Selama pengendaliannya efektif dan pelaksanaannya dapat diandalkan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan hampir mencapai tujuannya dan hanya tinggal menunggu waktu sampai ia sampai di sana.

Menurut Herujito (2021:84), perencanaan melibatkan membuat pilihan tentang apa yang akan Anda lakukan di masa depan. Perumusan kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan bagian penting dari proses perencanaan.

Menurut Nugroho (2021:81) bahwa suatu perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- 
- a. Sistematis, dalam arti setiap rencana yang disusun harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai untuk Musrenbang.
 - b. Terpadu, artinya setiap aspek perencanaan dalam Musrenbang memiliki keterkaitan yang saling mendukung baik dengan rencana yang ada maupun program yang dimiliki dan dikembangkan oleh SKPD yang membidangi.
 - c. Transparan, artinya dalam proses perencanaan tidak boleh ada hal-hal yang tidak diketahui oleh setiap peserta musrenbang mulai dari usulan, kuantitas, kualitas, dan biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas perlu diwujudkan. . Ini mencakup segala sesuatu mulai dari proposal itu sendiri hingga kuantitas, kualitas, dan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan.
 - d. Adalah mungkin untuk mempertanggungjawabkan apa yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan". Setiap prosedur perencanaan, seperti permintaan prioritas dari masyarakat, serta pembangunan yang telah dilakukan sebagai hasil musrenbang, harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak peserta musrenbang.

Sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2004 dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan Sinergi antara daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

Menurut Lincoln (2021) dalam Sjafrizal (2016:30) jenis perencanaan pembangunan menurut jangka waktu dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka panjang sering kali mencakup periode waktu mulai dari sepuluh hingga dua puluh lima tahun, rencana jangka panjang biasanya disebut sebagai rencana perspektif, dan mencakup departemen pengembangan umum. Perencanaan jangka panjang, dengan kata lain, memerlukan penyusunan visi jangka panjang dari kerangka pembangunan, yang dilakukan dengan harapan dan impian masyarakat umum. Sebagai konsekuensinya, perencanaan jangka panjang menjadi lebih komprehensif; namun, itu tidak mencapai tingkat kedalaman yang dibutuhkan untuk program dan kegiatan tertentu. Sebaliknya, topik yang dibahas meliputi topik ekonomi, sosial budaya, dan geografis. Perencanaan jangka panjang juga mencakup perencanaan

pembangunan untuk setiap periode lima tahun. Ini adalah komponen tambahan dari perencanaan jangka panjang. Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa rencana jangka panjang dapat menjadi acuan bagi pembuatan rencana jangka menengah.

- b. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup jangka waktu empat sampai lima tahun, namun jumlah ini dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada lamanya waktu yang dihabiskan dalam peran presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah masing-masing menyusun rencana mereka sendiri untuk lima tahun berikutnya dari perencanaan jangka menengah negara. Tujuan perencanaan terutama untuk mengatur kegiatan dalam jangka panjang agar lebih efisien. Rancangan kerangka ekonomi makro, serta strategi, kebijakan, dan rencana pembangunan, semuanya merupakan komponen perencanaan jangka panjang. Komponen-komponen tersebut dikembangkan sejalan dengan visi dan tujuan presiden atau kepala daerah terpilih. Selain itu, perencanaan jangka menengah mencakup tujuan dan target kuantitatif dan kualitatif, yang memungkinkan perencanaan menjadi lebih terukur dan mudah digunakan sebagai dasar untuk pemantauan dan evaluasi lebih lanjut.
- c. Perencanaan untuk jangka pendek Perencanaan untuk jangka pendek seringkali hanya berlangsung selama satu tahun, itulah sebabnya mengapa kadang-kadang disebut sebagai rencana tahunan. Rencana ini sebenarnya hanya penjelasan strategi untuk jangka menengah.

Selain itu, rencana tahunan ini sangat operasional karena memuat program dan kegiatan, serta keuangan, untuk kegiatan tersebut. Bahkan dalam rencana tahunan ini, ada metrik kinerja dan target yang digariskan untuk setiap kegiatan dan program. Akibatnya, rencana tahunan tidak dijadikan sebagai landasan utama untuk menghasilkan proyeksi pendapatan dan proyeksi pengeluaran baik di tingkat nasional (RAPBN) maupun di tingkat daerah (RAPBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah nama yang diberikan untuk rencana tahunan yang mencakup semua sektor (RKPD). sementara terutama yang berkaitan dengan industri atau daerah, itu disebut rencana kerja untuk unit kerja regional (renja skpd).

2.4.4. Definisi Musrenbang

Musrenbang merupakan wadah dimana anggota masyarakat dapat menyampaikan harapan dan keinginannya mengenai proses pembangunan yang akan dilakukan dan peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam proses tersebut, serta peran yang harus dimainkan oleh masyarakat dalam pembangunan. yang akan dilaksanakan. Menurut Kimpraswil, proses Musrenbang memindahkan setiap daerah lebih dekat ke pusat dimulai dari Desa atau Kecamatan, pindah ke Kecamatan, kemudian pindah ke Kabupaten atau Kota (2019:2).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau disebut juga Musrenbang merupakan rapat tahunan yang mempertemukan banyak pemangku kepentingan dalam suatu masyarakat untuk mencapai mufakat

atas rencana kerja pembangunan desa (desa RKP). Rencana Musrenbang desa disusun pada bulan Januari menggunakan informasi dari dokumen masyarakat yang menguraikan strategi pembangunan jangka menengah (desa RPJM). Dalam Peraturan no. 6 Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 tentang pembangunan sistem perencanaan wilayah, setiap desa diharuskan membuat dokumen rencana lima tahunan yang dikenal sebagai RPJM desa dan dokumen rencana tahunan yang dikenal sebagai RKP desa. Dokumen-dokumen ini harus diserahkan ke Kabupaten Sumbawa.

Musrenbang merupakan ungkapan yang banyak digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, selain dikeluarkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Musrenbang dimaknai sebagai forum antar dasar dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUD ayat dua puluh satu. Sedangkan untuk Musrenbang Desa disebutkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa nomor 4 ayat (9) Pasal 1 Tahun 2014 bahwa Musrenbang Desa merupakan forum tahunan yang dipimpin oleh partisipasi para pemangku kepentingan di desa untuk menyetujui kegiatannya di desa dalam 5 tahun. (lima) dan interval 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Musrenbang Desa sebagai forum tahunan yang dipimpin oleh partisipasi para pemangku kepentingan di desa..

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 21 Tahun 2020 tentang Arahan Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar pelaksanaan Musrenbang. Proses Musrenbang dibagi menjadi beberapa tahapan yang berlangsung di berbagai desa, kelurahan, SKPD, dan musrenbang kelurahan.

Dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2014 Bab II pasal 3 ayat (1) yang berisi Musrenbang Desa bertujuan untuk :

- a. Memperhatikan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah perencanaan yang diadakan di tingkat bawah.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai dengan penyaluran uang desa dari APBD kabupaten atau sumber pembiayaan lainnya.
- c. Menetapkan urutan kepentingan kegiatan yang akan dipresentasikan untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan dan yang pendanaannya akan diminta melalui APBD Provinsi.

2.4.5. Keluaran Musrenbang

Dalam buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Desa Luaran atau hasil dari Musrenbang Desa adalah

- a. Daftar hal-hal yang paling penting untuk dilakukan agar siap untuk Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran berikutnya.
- b. Daftar masalah yang paling mendesak yang dihadapi masyarakat, yang harus dikirim ke kantor kecamatan Musrenbang.

- c. Berikut ini adalah daftar nama-nama Tim Delegasi Desa yang akan mengikuti Musyawarah Pembangunan (musrenbang) kecamatan (terdiri dari 3 orang atau 5 orang; jika 3 orang, minimal 1 perempuan; jika 5 orang, paling banyak 5 orang; minimal 2 wanita).

2.5. Kerangka Berfikir

Dalam model pembangunan kontemporer, masyarakat dipandang sebagai pelaku utama dalam pembangunan, sedangkan peran pemerintah dalam proses ini hanya sebatas fasilitator. Akibatnya, masyarakat mendapatkan hak untuk menjadi bagian dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sebenarnya. Proses adopsi partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara maksimal jika didukung oleh berbagai faktor antara lain uang tunai, tenaga, waktu aktif, dan kapasitas anggota masyarakat untuk menawarkan ide-ide untuk kepentingan pembangunan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



2.6. Definisi Konseptual

Kendala pada isu variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk bekerja di lapangan adalah apa definisi konseptualnya. Selain itu, definisi konseptual adalah definisi yang masih berupa konsep, dan makna definisi tersebut masih cukup abstrak, meskipun masih dapat dipahami secara intuitif.

Dengan demikian, untuk memahami dan memfasilitasi interpretasi banyak teori dalam penelitian ini, peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini dan sesuai dengan isi kerangka penelitian peneliti. Kemudian, beberapa definisi konseptual yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari dalam proposal ini berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN DI DESA PLAMPANG, KABUPATEN PLAMPANG SUMBAWA PADA TAHUN 2021"**, antara lain:

1. Konsep Partisipasi

Cohen dan Uphoff, dalam Sari (2016: 60), mengklasifikasikan partisipasi sebagai salah satu dari empat kategori. Kategori tersebut adalah sebagai berikut: 1) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 3) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan 4) Partisipasi masyarakat lokal dalam tahap penilaian hasil.

2. Konsep Perencanaan Pembangunan desa

Menurut apa yang dikatakan dalam artikel Herujito (2001:84), "perencanaan adalah pilihan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan." Perumusan kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan bagian penting dari proses perencanaan.

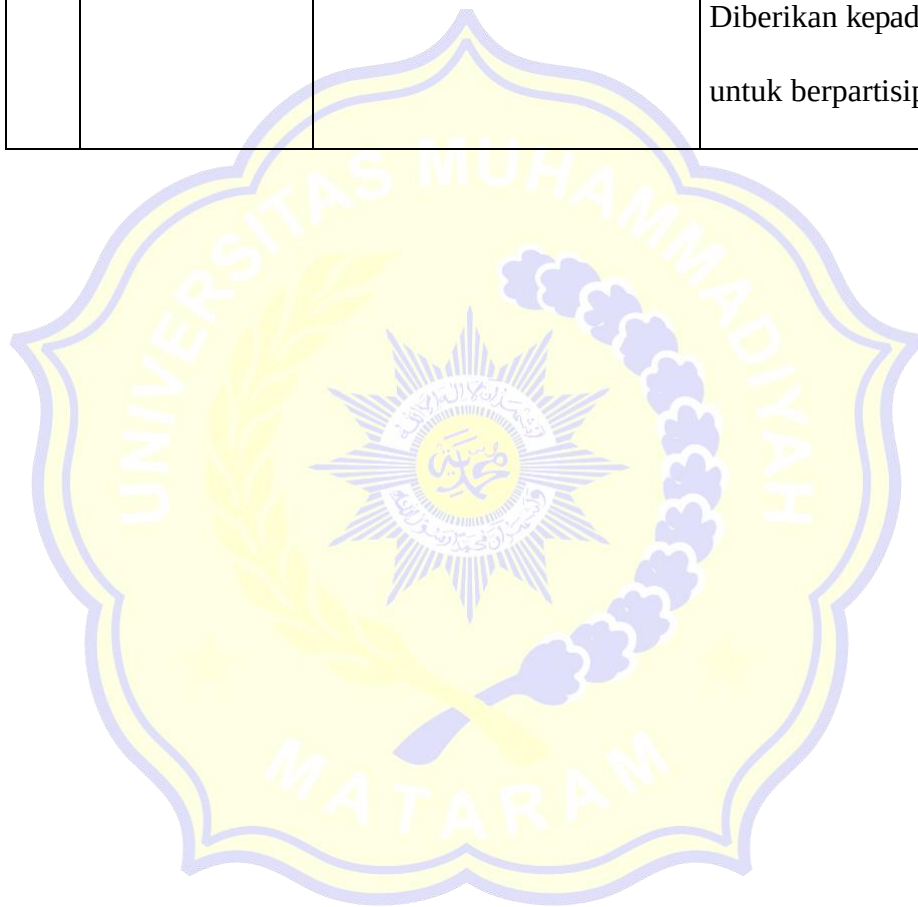
2.7. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah komponen penelitian yang memberitahu kita bagaimana mengukur variabel yang berbeda dan bertanggung jawab untuk memberikan kita informasi ini. Suatu definisi ilmiah dianggap operasional jika mengandung informasi yang benar-benar bermanfaat bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Ketika seorang peneliti melihat pada definisi operasional sebuah penelitian, mereka dapat mengidentifikasi variabel untuk diselidiki karena memberikan indikator bagaimana variabel diukur. Selain itu, definisi operasional studi memungkinkan peneliti untuk menemukan variabel untuk diselidiki. Tabel 4 memberikan gambaran tentang kerangka konseptual peneliti, yang berfungsi sebagai dasar untuk definisi operasional penelitian ini.

Tabel 2.3 Definisi Operasional

No	Variabel	Sub variabel	Indikator
1	Konsep Partisipasi	Pengambilan keputusan	Kehadiran dalam rapat, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan masyarakat.
		Pelaksanaan program	Perencanaan, pelaksanaan, tujuan program
		Pemanfaatan hasil	Menjaga, merawat dan memelihara pembangunan yang ada di desa.
		Evaluasi hasil	Mengawasi dan mengontrol setiap perencanaan pembangunan yang akan berjalan.
2	Konsep Perencanaan anggaran pembangunan	Faktor-Faktor pendukung perencanaan anggaran pembangunan di desa	Sumber Daya Manusia (SDM) Kemauan yang kuat dari masyarakat

			Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
			Adanya kesempatan yang
			Diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivism atau entrepreneurship untuk mengkaji kondisi objek alam dimana peneliti seperti instrumen utama dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data induktif dan hasil penelitian kualitatif menonjolkan makna, keunikan, fenomena menonjolkan makna, keunikan, fenomena menonjolkan hasil penelitian kualitatif menonjolkan makna, keunikan, fenomena (Sugiyo 2018: 9). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, dan lebih banyak mengandalkan analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna (dilihat dari sudut pandang subjek) memainkan peran yang lebih signifikan.

Studi termasuk data naratif dianggap sebagai contoh metodologi penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Steven Dukeshire dan Jannifer Thurlow dalam (Sugiyono, 2018: 3). Teknik penelitian kualitatif digunakan terutama untuk mendapatkan data yang kaya dan pengetahuan yang mendalam tentang isu atau isu yang akan dibahas. Untuk melakukan ini, metode penelitian kualitatif menggunakan orientasi kelompok GRCUS, dalam wawancara dan observasi karena terlibat dalam

pengumpulan data. Sebuah teknik yang dikenal sebagai pendekatan deskriptif adalah salah satu yang berusaha menemukan solusi untuk masalah yang sedang berlangsung dengan mengumpulkan, merakit, menjelaskan, menganalisis, dan mengumpulkan data. Akibatnya, temuan penelitian ini ke depan akan memperjelas data tentang keterlibatan masyarakat dan variabel-variabel yang menghambat perencanaan anggaran untuk pembangunan desa.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitiannya di tempat yang telah dipilihnya. Lokasi pencarian telah ditentukan setelah melalui pertimbangan yang matang agar dapat melaksanakan prosedur yang telah digariskan dalam rencana yang telah dibuat. Dusun Plampang yang terletak di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penelitian ini.

Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti pada saat penelitian dilakukan oleh peneliti; hal ini dikarenakan telah diberikan izin atau izin resmi telah diberikan di kampus. Jangka waktu yang peneliti pilih dapat berkisar antara 45 (empat puluh lima) hari, 15 (lima belas) hari untuk pengumpulan data, dan 30 (tiga puluh) hari untuk pengolahan data. Kerangka waktu ini juga mencakup presentasi dalam bentuk tesis, konsultasi, atau pelaksanaan rekomendasi tesis.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Karena responden adalah pembawa pertanyaan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, maka keputusan respondenlah yang harus ditanggapi dalam penelitian kualitatif. Kemudian, dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, yang tidak dimaksudkan untuk tidak menggeneralisasi atau menggeneralisasi dari hasil penelitian, melainkan lebih menekankan pada kedalaman informasi yang diperoleh untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti dengan penelitian kualitatif, seorang peneliti membutuhkan informan. yang benar-benar tahu datanya. atau informasi yang tepat terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Para peneliti menggunakan jenis pengambilan sampel yang dikenal sebagai sampel yang ditargetkan untuk penyelidikan khusus ini. Pendekatan sampel desain ini merupakan strategi pengambilan sampel untuk sumber data yang mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono (2018; 96). Pertimbangan khusus ini misalnya, orang tersebut dianggap lebih mengetahui apa yang kita antisipasi, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memungkinkan peneliti untuk lebih mudah mengeksplorasi item/situasi sosial yang sedang diteliti. Itu hanya dua contoh.

Adapun informan yang peneliti tunjuk pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Kepala desa, sekretaris desa, kepala BPD, dan dua pejabat pemerintah lainnya dari desa Plampang yang terletak di kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.
2. Dalam batas-batas desa Plampang, ada total 4 (empat) tokoh masyarakat.
3. 5 anak muda berpengaruh.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data primer merupakan sumber data yang langsung menyampaikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). (Sugiyono, 2015:137). Sumber informasi yang paling penting untuk penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung dengan orang-orang yang memberikan informasi.
2. Data sekunder adalah data yang tidak segera memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh melalui rekaman objek, pengambilan data atau dokumen dari item tersebut, atau metode lain di luar pengamatan langsung. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi dibedakan dari metode lain oleh sejumlah fitur yang membedakan. Ruang lingkup pengamatan melampaui individu untuk memasukkan fenomena alam lainnya juga. Sugiyono (2015:203). Menurut Hadi (1986), sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2015:203), tindakan observasi merupakan proses yang rumit, yang melibatkan berbagai proses, baik proses biologis maupun psikologis, serta psikologis. Teknik observasi merupakan salah satu pendekatan yang sangat baik untuk mengumpulkan pengetahuan tentang status tempat yang terdapat unsur item dan tema. Proses memori adalah yang lebih penting dari keduanya, tetapi metode pengamatan masih sangat penting.

Dari sudut pandang ini dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi stadion merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menemukan situasi di lapangan yang telah dilakukan. Tingkat keberhasilan penelitian secara alami ditentukan dan diukur melalui penggunaan observasi. Suatu kegiatan

yang dikenal sebagai pengamatan adalah kegiatan di mana data diperoleh melalui proses pengamatan langsung terhadap hal-hal dan waktu tertentu, diikuti dengan pencatatan metodis dari hal-hal yang telah diperhatikan. Ketika orang tua memenuhi perannya sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan influencer, pengamatan dapat dilakukan tentang dinamika yang muncul.

Pedoman observasi disusun dalam bentuk ikhtisar atau item luas dari tindakan yang akan diamati. Format ini dipilih karena paling mudah dipahami. Peneliti tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang sedang diamati, oleh karena itu pengamatan dilakukan secara non-partisipatif. Ini berarti bahwa peneliti hanya bertanggung jawab untuk melakukan pengamatan.

3.5.2 Wawancara

Adalah metode pengumpulan informasi yang dibutuhkan peneliti melalui serangkaian percakapan dan bentuk lain dari keterlibatan verbal dengan partisipan. Wawancara adalah metode lain pengumpulan informasi, di mana pertanyaan dan jawaban lisan dipertukarkan tatap muka antara pewawancara dan subjek wawancara. Eserberg di (Sugiyono, 2018: 114)

Wawancara atau wawancara dapat didefinisikan sebagai berikut: pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui penggunaan pertanyaan dan tanggapan, sehingga peserta dapat membangun makna dalam kaitannya dengan topik tertentu. Ketika seorang peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengungkap masalah yang

membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, disarankan agar mereka menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, Namun, jika peneliti tertarik pada hal-hal lain yang dapat dipelajari melalui pengetahuan yang lebih dalam. Dalam penelitian ini, wawancara semi-layanan digunakan. Artinya sebelum wawancara, daftar pertanyaan yang perlu diajukan sudah disiapkan; namun pelaksanaannya disesuaikan dengan responden. Teknik wawancara semi terstruktur dari jenis wawancara ini termasuk dalam Kategori In-depthintView Wiawan, yang menghasilkan wawancara yang lebih terbuka. Wawancara semacam ini dirancang untuk mengidentifikasi kesulitan lebih bebas, di dalam pihak yang diundang untuk wawancara atau diundang untuk sudut pandang dan ide. Tujuan wawancara adalah untuk mengungkap masalah. Selama wawancara, peneliti dituntut untuk memperhatikan, mencatat, dan melacak apa yang dikatakan oleh informan.

3.5.3 Dokumentasi

Sugiyono, dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang dikumpulkan untuk menambah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dalam penelitian (2018; 124). Saat melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara, akan sangat membantu jika memiliki makalah dan foto penting untuk mendukung temuan. Ini akan memberikan temuan kredibilitas dan keandalan yang lebih besar. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat komprehensif, valid, dan tidak tergantung pada perkiraan, pendekatan ini adalah cara pengumpulan data

yang memberikan catatan penting yang terkait dengan topik penelitian. Catatan ini dihasilkan dengan mengambil data yang ada yang dapat diakses dalam catatan dokumen. Dokumen ini perlu diambil untuk mendapatkan data, foto, dan catatan lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik pada saat pengumpulan data maupun dalam jangka waktu tertentu setelah penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Peneliti sebelumnya telah melakukan analisis terhadap jawaban-jawaban yang terlihat saat wawancara berlangsung. Jika jawaban orang yang diwawancarai setelah analisis tidak memuaskan, peneliti akan melanjutkan penyelidikan, setelah memperoleh data yang dinilai dapat diandalkan, pada fase tertentu dalam proses. Proses penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai; ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah lengkap. Analisis data melibatkan sejumlah kegiatan, yang paling penting adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penjelasan tentang analisis data disajikan dalam format berikut:

1. *Data Collection*(Pengumpulan Data)

Temuan penelitian ini diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data mungkin memakan

waktu beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan, yang berarti bahwa informasi yang dikumpulkan akhirnya akan cukup luas.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Karena banyaknya informasi yang dapat diterima dari lapangan, sangat penting untuk dicatat dengan cermat dan tepat. Ketika Anda mengurangi jumlah data yang Anda miliki, Anda diminta untuk meringkasnya, memilih dan memilih item utama, berkonsentrasi pada hal-hal vital, dan mencari pola. Oleh karena itu, pengurangan jumlah data akan menghasilkan gambar yang lebih jelas.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap berikutnya, yang terjadi setelah data direduksi, adalah menampilkan data. Data dapat disajikan dalam penelitian kualitatif dalam berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada deskripsi singkat, grafik, korelasi antar kategori, organisasi, dan format serupa lainnya. Menurut temuan Miles dan Huberman (2019), "penampilan data yang paling sering untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks naratif." Penulisan naratif sejauh ini merupakan format yang paling umum untuk menyajikan temuan-temuan dari penelitian kualitatif. Melalui penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, melalui perencanaan persalinan selanjutnya sesuai dengan yang terjadi, dan melalui perencanaan persalinan selanjutnya sesuai dengan inputan.

Selain itu, dianjurkan untuk menyajikan data, dan meskipun dapat dilakukan dalam bentuk prosa naratif, dapat juga dilakukan dalam bentuk grafik, matriks, jaringan (network), dan bagan. [rujukan?] (Sugiyono, 2020: 137). Dalam penelitian khusus ini, hasilnya disajikan dalam satuan-satuan yang kemudian akan digabungkan menjadi satu. Data yang diberikan berupa kata-kata atau narasi, tabel, grafik, dan gambar kemudian didiskusikan.

4. *Conclusion drawing / Verification* (Verifikasi dan Menyimpulkan Data)

Tahap terakhir, nomor empat, selesai setelah semua data terkumpul. Pada proses ini, kami tidak hanya akan menyiapkan temuan kami dan mengacu pada konsep penelitian, tetapi kami juga akan melakukan analisis keabsahan data yang telah kami kumpulkan. Untuk sampai pada kesimpulan akhir, lebih banyak bukti pertama-tama harus dikumpulkan dan diorganisasikan menjadi satu kesatuan yang koheren.

5. Penarikan Kesimpulan

Peneliti segera mulai membuat kesimpulan dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang mereka kumpulkan di lapangan. Pada awalnya, kesimpulannya kabur, dan masih ada masalah terbuka meskipun proses analisis data telah meletakkan dasar yang kuat berdasarkan peristiwa yang diamati sebelumnya. Dalam penyelidikan ini, adalah mungkin untuk menentukan ini dari hasil wawancara dan dokumen, yang memungkinkan kesimpulan sementara awal dapat dicapai. Peneliti memperpanjang jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengamati subjek untuk memberikan hasil

yang lebih andal. Pengamatan ini dapat mengarah pada penemuan data tambahan, yang jika digabungkan dengan kesimpulan sementara yang ditarik sebelumnya, dapat mengarah pada penarikan kesimpulan yang lebih pasti.

